

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pasca reformasi. Kebijakan ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Kebijakan desentralisasi fiskal ini bertujuan mendorong efisiensi alokasi sumber daya, meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah (Halim, 2018)

Menurut Gianelle et al., (2026) menjelaskan bahwa tingkat desentralisasi fiskal dapat diukur melalui kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan pajak dan sumber penerimaan asli daerah lainnya secara mandiri. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari sumber-sumber pendapatan yang diperoleh secara mandiri, tanpa ketergantungan berlebihan terhadap transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen fiskal terpenting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim, 2016)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang Sah. Masing-masing komponen memiliki karakteristik, potensi, dan dinamika yang berbeda-beda bergantung pada kondisi geografis, sosial ekonomi, serta kebijakan yang diterapkan di setiap daerah (Mahmudi, 2019)

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika fiskal nasional menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Kebijakan penyesuaian fiskal yang diterapkan oleh pemerintah pusat juga berdampak pada transfer dana ke daerah. Dalam upaya menjaga keseimbangan keuangan negara, pemerintah pusat cenderung mengurangi anggaran transfer ke daerah (TKD), yang dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pendapatan daerah (PAD) dan mengoptimalkan sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah penyesuaian fiskal nasional untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan pengendalian belanja pemerintah pusat (Purbaya, 2024). Pemotongan TKD tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah, terutama bagi sektor-sektor pelayanan publik yang sangat bergantung pada dana transfer, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah dituntut untuk lebih adaptif dalam mengelola pendapatan maupun pengeluarannya. Pengurangan TKD

mendorong daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan program prioritas. Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan sumber pendapatan lainnya menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Rahmawati, 2022). Selain itu, efisiensi belanja juga menjadi fokus utama agar penurunan TKD tidak berimplikasi negatif terhadap kualitas layanan publik. Secara keseluruhan, kebijakan pemotongan TKD ini mencerminkan kebutuhan penyesuaian fiskal nasional sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD serta reformasi tata kelola anggaran (Mahendra, 2023). Sejalan dengan tujuan tersebut, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Penguatan PAD juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah pusat memberikan ruang bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi lokalnya guna mendukung kemampuan fiskal. Kewenangan pengelolaan sumber daya daerah merupakan implementasi nyata dari prinsip desentralisasi yang memberikan keleluasaan bagi daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing. Pengelolaan PAD yang optimal meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Udayanti et al., 2025).

Pada level nasional, tren PAD Indonesia secara agregat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, total PAD seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 10–15 persen per tahun

dalam periode 2015–2022. Namun demikian, peningkatan agregat ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang merata di seluruh daerah, karena terdapat disparitas yang sangat besar antardaerah dalam hal kapasitas fiskal dan kemampuan menggali sumber-sumber PAD (Statistik, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat daerah yang mengalami ketidakstabilan penerimaan PAD akibat perubahan kondisi ekonomi dan fiskal daerah. Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat serta kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan stabilitas pendapatan daerah. Fenomena perubahan struktur pendapatan dan belanja daerah selama masa pandemi juga dijelaskan dalam penelitian (Ayu et al., 2023) yang menemukan adanya *ratcheting effect* dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Indonesia, di mana target anggaran daerah cenderung dipengaruhi oleh realisasi anggaran tahun sebelumnya serta perubahan kondisi ekonomi pada masa pandemi.

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata internasional terkemuka di dunia memiliki potensi fiskal yang sangat besar, khususnya yang bersumber dari sektor pariwisata. Aktivitas pariwisata yang tinggi mendorong pertumbuhan berbagai jenis usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi daerah, sehingga secara teoritis kabupaten/kota di Bali memiliki kapasitas PAD yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki struktur ekonomi berbeda (Dewi & Sudiarta, 2021)



Gambar 1. 1 Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Tahun 2017-2022

(Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2022)

Berdasarkan gambar 1 yang menunjukkan kinerja pendapatan daerah Provinsi Bali periode 2017-2022, rata-rata pertumbuhan sebesar -0,12% (yoy). Pendapatan daerah Provinsi Bali yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sepanjang 6 tahun yaitu mencapai 3,80%, namun kenaikan tersebut masih dapat didukung dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mampu memberikan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,00%. Dari tiga komponen lainnya mengalami kenaikan dan penurunan rata-rata pertumbuhan. Pendapatan Pajak mengalami peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,13%, Pendapatan Retribusi mengalami penurunan rata-rata sebesar -19,61%, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami rata-rata kenaikan sebesar 4,49%. Rata-rata proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali selama tahun 2017–2022 posisi tertinggi masih didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah 84%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 10%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5%, dan Pendapatan Retribusi Daerah 1%.

Sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam, mulai dari

sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, hingga jasa. Keberagaman sektor tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Buleleng terus didorong untuk menggali potensi fiskal secara lebih intensif agar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah semakin meningkat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi indikator penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal pemerintah daerah. Penelitian (Ayu Wulan, Trisna Dewi & Wiguna, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan upaya pajak daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Temuan tersebut mempertegas bahwa kemampuan daerah dalam menggali potensi PAD merupakan faktor penting dalam menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan, termasuk bagi Kabupaten Buleleng.

Dalam beberapa tahun terakhir, PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan pola perkembangan yang dinamis. Penerimaan dari pajak daerah masih menjadi penyumbang utama, khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame sejalan dengan berkembangnya sektor layanan dan pariwisata di wilayah utara Bali. Sementara itu, retribusi daerah menghadapi tantangan terkait efektivitas pemungutan serta penyesuaian jenis layanan publik yang dikenakan retribusi. Di sisi lain, kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan peranan yang relatif stabil, meski potensinya masih dapat dimaksimalkan melalui inovasi tata kelola aset dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Gambaran perkembangan realisasi PAD Kabupaten Buleleng pada tiga titik waktu yang merepresentasikan dinamika fiskal berbeda selama periode penelitian disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1. 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2016, 2020, dan 2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)
2016	282.113.899.551,44
2020	318.986.891.632,31
2024	509.474.781.931,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng, diolah Penulis

Berdasarkan data pada Tabel 1, realisasi PAD Kabupaten Buleleng menunjukkan pergerakan yang tidak linear sepanjang periode 2016–2024. Meskipun secara nominal terdapat peningkatan dari Rp282,11 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp509,47 miliar pada tahun 2024, capaian pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp318,98 miliar mengindikasikan adanya kerentanan struktural dalam komposisi sumber-sumber PAD daerah ini. Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap struktur pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai seberapa besar kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD dari tahun ke tahun, serta komponen mana yang memiliki peranan paling dominan dalam membentuk struktur PAD Kabupaten Buleleng yang selanjutnya menjadi fokus kajian dalam penelitian ini (Sari & Pratiwi, 2022).

Permasalahan terkait kontribusi komponen PAD yang tidak merata sesungguhnya bukan hanya dialami oleh Kabupaten Buleleng, melainkan merupakan fenomena yang juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas et al. (2024) ditemukan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumbawa selama periode 2012–2021 tergolong sangat efektif, dengan rata-rata efektivitas mencapai 103,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pajak daerah dan mampu mengoptimalkan potensi sektor pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Namun, hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak daerah belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 26,55 persen, yang berada dalam kategori sedang. Artinya, meskipun target pajak daerah berhasil dicapai, penerimaan dari sektor pajak belum menjadi penyumbang dominan bagi total PAD Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini menandakan bahwa struktur fiskal Kabupaten Sumbawa masih belum optimal dan masih bergantung pada sumber pendapatan lain di luar pajak daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, baik melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, perluasan basis pajak, maupun pembaruan sistem pemungutan. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi pajak yang selama ini belum tergarap dapat dimaksimalkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kapasitas PAD sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Kondisi serupa juga ditemukan pada penelitian di daerah-daerah lain dalam lingkup Provinsi Bali. Penelitian Asmara dan Setiawan (2021) di Kota Denpasar

menemukan bahwa pajak daerah mendominasi kontribusi PAD dengan rata-rata di atas 75 persen, sementara komponen lainnya relatif kecil. Penelitian Yuliani dan Kusumawati (2022) di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran sangat dominan dan membuat PAD Badung sangat sensitif terhadap perubahan jumlah wisatawan. Temuan dari kedua daerah tersebut mempertegas bahwa ketimpangan kontribusi antarkomponen PAD merupakan tantangan struktural yang perlu dikaji secara mendalam, termasuk di Kabupaten Buleleng.

Secara lebih spesifik, pengelolaan PAD Kabupaten Buleleng masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khoryani (2025) yang meneliti kontribusi dan efektivitas komponen PAD Kabupaten Buleleng periode 2019–2023 menemukan bahwa komponen Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyumbang terbesar dengan rata-rata kontribusi 46,88%, diikuti Pajak Daerah sebesar 40,94%, sementara Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi yang relatif kecil. Dari sisi efektivitas, rata-rata keseluruhan PAD hanya mencapai 92,31%, dengan Retribusi Daerah menjadi komponen yang paling tidak efektif. Menariknya, pada tahun 2023 terjadi pergeseran dominasi di mana Pajak Daerah mulai menggeser posisi Lain-lain PAD yang Sah sebagai komponen kontributor terbesar. Selain itu, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Buleleng meskipun meningkat dari 19,83% menjadi 25,32%, masih tergolong sangat rendah dengan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini semakin diperparah dengan posisi Kabupaten Buleleng yang pada tahun 2022 tergeser dari peringkat keempat menjadi kelima

kabupaten/kota dengan PAD terbesar di Provinsi Bali, dengan total realisasi PAD hanya mencapai Rp410 miliar dibandingkan Kabupaten Tabanan yang mencapai Rp436 miliar. Selain itu, penelitian yang secara khusus menganalisis PAD Kabupaten Buleleng melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan telah dilakukan oleh (Suarmanayasa, Putra Yasa, 2024). Hasil kajian tersebut mengungkapkan bahwa salah satu sumber penerimaan PAD Kabupaten Buleleng yang utama adalah dari pajak daerah, dengan kontribusi mencapai 39,84% dari total PAD. Akan tetapi, kontribusi PBB-P2 secara spesifik terhadap PAD masih masuk kategori sangat kurang karena berada di bawah 10%. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam studi ini, yaitu dominasi Pajak Daerah sebesar rata-rata 39,73% (kategori Cukup Baik) sepanjang 2016–2024 sekaligus menunjukkan masih adanya potensi komponen pajak daerah yang belum tergalai optimal.

Namun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang cukup signifikan. Pertama, penelitian Khoryani (2025) hanya mencakup periode 2019–2023 dan belum menangkap dinamika PAD Kabupaten Buleleng secara komprehensif sejak 2016, termasuk pergeseran dominasi komponen yang mulai terlihat pada 2023 dan kemungkinan berlanjut hingga 2024. Kedua, belum ada penelitian yang menganalisis kontribusi seluruh komponen PAD di Kabupaten Buleleng secara bersamaan dengan cakupan periode yang panjang, sehingga pergeseran dominasi antarkomponen dari waktu ke waktu belum terpotret secara sistematis. Ketiga, belum ada penelitian yang secara sistematis menelaah pergeseran (*shifting*) dominasi komponen PAD di Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu yang cukup panjang untuk menangkap dampak perubahan kebijakan,

kondisi ekonomi, dan guncangan eksternal terhadap struktur PAD daerah ini (Nugroho & Wahyuni, 2020; Sari & Pratiwi, 2022)

Selain kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini perlu dilakukan karena beberapa alasan yang bersifat praktis dan strategis. Pertama, kondisi tekanan fiskal akibat penurunan TKD yang sedang dihadapi Kabupaten Buleleng saat ini menjadikan optimalisasi PAD sebagai kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Tanpa pemahaman yang akurat tentang kontribusi masing-masing komponen PAD, pemerintah daerah tidak dapat menentukan prioritas kebijakan yang tepat dan berisiko salah mengalokasikan sumber daya. Kedua, fakta bahwa masing-masing komponen PAD yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah tentu memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda-beda menunjukkan bahwa tanpa analisis kontribusi yang rinci, tidak dapat diketahui komponen mana yang selama ini menjadi penopang utama dan komponen mana yang masih memiliki potensi besar namun belum tergali secara optimal. Analisis tren kontribusi juga diperlukan untuk memahami apakah peranan setiap komponen cenderung meningkat, menurun, atau berfluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan peningkatan PAD yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Ketiga, periode 2016–2024 mencakup kondisi sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19, yang merupakan guncangan eksternal terbesar dalam satu dekade terakhir. Analisis kontribusi komponen PAD dalam rentang waktu ini akan menghasilkan gambaran yang jauh lebih komprehensif dan representatif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya mencakup periode yang lebih pendek.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat bahwa pemahaman yang mendalam dan berbasis data mengenai kontribusi masing-masing komponen PAD merupakan prasyarat mutlak bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun strategi optimalisasi PAD yang tepat sasaran. Tanpa analisis yang sistematis dan komprehensif, kebijakan peningkatan PAD berisiko tidak menyentuh komponen yang paling potensial untuk dikembangkan, atau sebaliknya, memberikan tekanan berlebihan pada komponen yang sudah optimal sementara mengabaikan potensi yang belum tergali. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng Tahun 2016–2024"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan pada latar belakang, mampu diidentifikasi masalah pada riset ini ialah:

- 1) Realisasi total PAD Kabupaten Buleleng selama periode 2016–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat tren pertumbuhan positif pada periode 2016–2019, terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2020 akibat tekanan ekonomi dan fiskal yang bersifat eksternal, dan pemulihan pada tahun 2021–2024 tidak berlangsung secara merata pada seluruh komponen PAD. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya kerentanan struktural dalam komposisi sumber-sumber PAD Kabupaten Buleleng yang perlu dikaji lebih mendalam.
- 2) Ketidakmerataan Kontribusi Antarkomponen PAD. Terdapat indikasi ketidakmerataan yang substansial dalam hal kontribusi masing-masing

komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Buleleng. Pajak Daerah ditengarai mendominasi struktur PAD secara konsisten, sementara komponen lain seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang relatif kecil. Ketidakseimbangan ini berpotensi mengurangi ketahanan fiskal daerah apabila sumber dominan mengalami gangguan eksternal

- 3) Tingginya Ketergantungan PAD pada Sektor Pariwisata. Sebagian besar komponen pajak daerah di Kabupaten Buleleng, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aktivitas sektor pariwisata. Kondisi ini menyebabkan PAD Kabupaten Buleleng sangat rentan terhadap guncangan eksternal yang berdampak pada sektor pariwisata, sebagaimana terbukti dari anjloknya realisasi PAD pada tahun 2020.
- 4) Belum Optimalnya Kontribusi Retribusi Daerah. Meskipun Kabupaten Buleleng memiliki beragam fasilitas dan layanan publik yang berpotensi menjadi sumber retribusi daerah, kontribusi Retribusi Daerah terhadap total PAD terindikasi masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurang efektifnya pemungutan retribusi, rendahnya tarif retribusi yang tidak mengikuti perkembangan biaya, maupun keterbatasan kapasitas administrasi dalam pengelolaan retribusi daerah
- 5) Rendahnya Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang bersumber dari dividen dan hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penyertaan modal pemerintah daerah menunjukkan

kontribusi yang relatif kecil dan tidak stabil terhadap total PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja BUMD di Kabupaten Buleleng belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi penerimaan PAD daerah.

- 6) Ketidakstabilan Komponen Lain-lain PAD yang Sah. Komponen Lain-lain PAD yang Sah memiliki karakteristik yang sangat beragam dan kurang dapat diprediksi karena bersumber dari berbagai jenis penerimaan yang tidak bersifat reguler, seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah, dan penerimaan ganti rugi. Ketidakstabilan kontribusi komponen ini menyulitkan proses perencanaan anggaran daerah secara akurat dan berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam proyeksi PAD
- 7) Penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis kontribusi masing-masing komponen PAD di Kabupaten Buleleng dengan cakupan data yang mencakup periode sebelum, selama, dan sesudah tekanan ekonomi dan fiskal yang signifikan (2016–2024) masih sangat terbatas. Ketiadaan kajian yang sistematis dan berbasis data terkini menyebabkan pemerintah daerah kekurangan landasan empiris yang memadai untuk merumuskan kebijakan optimalisasi PAD yang tepat sasaran (Asmara & Setiawan, 2021; Sari & Pratiwi, 2022).
- 8) Kurangnya Pemahaman mengenai Pergeseran Dominasi Komponen PAD. Belum ada penelitian yang secara sistematis mendokumentasikan dan menganalisis pergeseran (shifting) dominasi kontribusi antarkomponen PAD di Kabupaten Buleleng dari waktu ke waktu, terutama dalam merespons perubahan kebijakan fiskal daerah, dinamika ekonomi lokal, dan dampak krisis kesehatan global. Pemahaman yang memadai mengenai pergeseran ini

sangat penting sebagai dasar penyusunan strategi diversifikasi sumber PAD yang lebih resilien.

- 9) Potensi PAD yang Belum Tergali Secara Optimal. Dengan posisi strategis sebagai kabupaten terluas di Provinsi Bali yang memiliki potensi ekonomi beragam yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang menunjukkan terdapat indikasi bahwa potensi PAD Kabupaten Buleleng belum seluruhnya tergali secara optimal. Kesenjangan antara potensi dan realisasi PAD yang masih terjadi menunjukkan perlunya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang lebih terarah pada komponen-komponen PAD yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi (BPS Kabupaten Buleleng, 2023).

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah sebelumnya, maka riset ini terfokus pada analisis kontribusi dan efektivitas komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016–2024. Penelitian dibatasi pada empat komponen PAD, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan sejumlah hal yang sudah disampaikan pada judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi komponen Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024?
2. Berapa besar kontribusi komponen Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024?
3. Berapa besar kontribusi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024?
4. Berapa besar kontribusi komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024?
5. Komponen PAD mana yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2016–2024?
6. Bagaimana tren perkembangan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selama periode 2016–2024?
7. Bagaimana elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wisatawan, realisasi investasi, dan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2016–2024?

1.5 Tujuan

Berlandaskan latar belakang masalah riset serta rumusan masalah, maka riset ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengukur besarnya kontribusi komponen Pajak Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024.
2. Menganalisis dan mengukur besarnya kontribusi komponen Retribusi Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024.
3. Menganalisis dan mengukur besarnya kontribusi komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024.
4. Menganalisis dan mengukur besarnya kontribusi komponen Lain-lain PAD yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2016–2024.
5. Mengidentifikasi komponen PAD yang memberikan kontribusi paling dominan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selama periode tahun 2016–2024.
6. Menganalisis tren perkembangan kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng selama periode 2016–2024.
7. Menganalisis elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wisatawan, realisasi investasi, dan pertumbuhan ekonomi pada periode tahun 2016–2024.

1.6 Manfaat

Riset ini diinginkan mampu memberikan manfaat bagi sejumlah pihak yakni:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan daerah dan manajemen keuangan publik, khususnya terkait analisis struktur dan kontribusi komponen PAD. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai kinerja fiskal pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan cakupan wilayah atau periode waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan teori desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah dalam konteks kabupaten yang memiliki karakteristik ekonomi campuran antara sektor tradisional dan pariwisata.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan, kemampuan analitis, serta pemahaman penulis mengenai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kontribusi masing-masing komponennya. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori keuangan daerah, konsep efektivitas, dan analisis kontribusi ke dalam konteks nyata pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi penulis dalam menganalisis kinerja fiskal daerah secara sistematis dan ilmiah.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami dinamika PAD serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kontribusi dan efektivitas masing-masing komponennya. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa, akademisi, serta peneliti yang ingin melakukan kajian lanjutan mengenai optimalisasi PAD, kemandirian fiskal, atau evaluasi kinerja pendapatan daerah di berbagai wilayah.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam mengevaluasi kinerja komponen PAD, mengidentifikasi sektor yang kontribusinya tinggi maupun rendah, serta merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih efektif. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pembenahan sistem pemungutan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

d. Bagi Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan PAD melalui kepatuhan pajak serta pemanfaatan layanan publik yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada pelaku ekonomi mengenai potensi yang dapat dikembangkan bersama pemerintah daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

lokal yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pembangunan di Kabupaten Buleleng.

